

SKRIPSI

EKUALISASI PEREDARAN USAHA ANTARA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014 PADA PT PADMA PACIFIC SUKSES

ANITA HOLLY



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

EKUALISASI PEREDARAN USAHA ANTARA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNANPAJAK PENGHASILAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAKPERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014 PADA PT PADMA PACIFIC SUKSES

sebagai salah satu persyaratan untul memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANITA HOLLY
A31112001**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

EKUALISASI PEREDARAN USAHA ANTARA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014 PADA PT PADMA PACIFIC SUKSES

disusun dan diajukan oleh

ANITA HOLLY
A31112001

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, April 2016

Pembimbing I



Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.S.A., CA.
NIP. 196111281988111001

Pembimbing II



Drs. Deng Siraja, Ak., M.Si., CA.
NIP.195112281986091002



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hi Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196509251990022001

SKRIPSI

EKUALISASI PEREDARAN USAHA ANTARA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014 PADA PT PADMA PACIFIC SUKSES

disusun dan diajukan oleh

ANITA HOLLY
A31112001

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **21 April 2016** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.S.A., CA	Ketua	1.
2.	Drs. Deng Siraja, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2.
3.	Dr. Hj. Andi Kusumawati S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3.
4.	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP	Anggota	4.
5.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	5.



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hi Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19650925 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : ANITA HOLLY

nim : A31112001

departemen/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

EKUALISASI PEREDARAN USAHA ANTARA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014 PADA PT PADMA PACIFIC SUKSES

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, April 2016

Yang membuat pernyataan,



ANITA HOLLY

PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga atas izin dan kemudahan yang diberikan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Ekualisasi Peredaran Usaha antara Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses”. Skripsi ini merupakan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Melalui kerja yang maksimal dengan segenap kemampuan, pikiran, tenaga dan waktu serta berbagai hambatan, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Peneliti telah mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semua itu mengingat peneliti juga masih dalam tahap belajar, tentunya tak luput dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat peneliti berikan.

Keberhasilan peneliti dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, maupun motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu Drs. Albert Holly B.Ac., dan Evie Wong yang telah mencurahkan kasih sayang dengan segenap hati tanpa tuntutan serta selalu memberikan dorongan, baik moril

maupun materiil, dalam kehidupan peneliti serta kakak-kakak peneliti Anthony Holly, S.E., Ak., CA., dan dr. Anneke Holly, S.Ked., yang selalu memberi dukungan. Terima kasih atas doa kalian.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., M.S., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Departemen Akuntansi.
4. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak., CA., sebagai Pembimbing I yang telah membantu dan mengarahkan peneliti selama penelitian skripsi.
5. Bapak Drs. Deng Siraja, M.Si., Ak., CA., sebagai Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan peneliti selama penelitian skripsi.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Kepada pimpinan beserta staf dan karyawan PT Padma Pacific Sukses yang telah memberikan bantuan, kesempatan, dan meluangkan waktu kepada peneliti selama melakukan penelitian sehingga dapat mendukung terselesaikannya skripsi ini.
8. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
9. Teman-teman Pe12ennial yang dalam kurun waktu kurang lebih empat tahun telah bersama-sama belajar dan berbagi cerita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
10. Sahabat selama kuliah Hell-o Kitty (Retno, Ida, Kiko, Novi), Hery, Etel, dan Eko. Terima kasih untuk semua yang kita lalui, semua bantuan dan doa kalian.

Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah peneliti susun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik guna penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Harapan peneliti, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi peneliti pribadi.

Makassar, April 2016

ANITA HOLLY

ABSTRAK

EKUALISASI PEREDARAN USAHA ANTARA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014 PADA PT PADMA PACIFIC SUKSES

EQUALIZATION GROSS INCOME BETWEEN ANNUAL TAX RETURN OF INCOME TAX FOR FIRM AND PERIODIC TAX RETURN OF VALUE ADDED TAXES IN 2014 AT PT PADMA PACIFIC SUKSES

Anita Holly
Yohanis Rura
Deng Siraja

Penelitian ini dilaksanakan di PT Padma Pacific Sukses, Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN yang dilaporkan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui cara ekualisasi peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN setahun, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan total peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan total penyerahan menurut SPT Masa PPN setahun. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode *descriptive-comparative*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan belum melaporkan peredaran usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, proses ekualisasi dilakukan dengan membandingkan Laporan SPT Masa PPN dengan Laporan SPT Tahunan PPh Badan, dan perbedaan peredaran usaha pada PT Padma Pacific Sukses disebabkan oleh uang muka dan laba atas penjualan aktiva tetap perusahaan.

Kata Kunci: Ekualisasi, peredaran usaha, SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Badan

This study was held at PT Padma Pacific Sukses, Makassar. The purpose of this study was to find out if the gross income towards annual tax return of income tax for firm and periodic tax return of Value Added Taxes that were reported have corresponded with the current regulations, to find out how the equalization of gross income between annual tax return of income tax for firm and periodic tax return of Value Added Taxes, and to find out the factors affecting the difference of the total gross income between annual tax return of income tax for firm and periodic tax return of Value Added Taxes. Data collection and literature study were used for this study. Descriptive-comparative method was used for data analysis method. The result of this study indicated that firm hasn't yet reported their gross income in accordance with the current regulations, equalization process was done by comparing annual tax return of income tax for firm and periodic tax return of Value Added Taxes, and gross income differences at PT Padma Pacific Sukses were caused by down payment and gain from selling the firm's fixed asset.

Keywords: *Equalization, gross income, periodic tax return of Value Added Taxes, and annual tax return of income tax for firm*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Sistematika Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Peredaran Bruto	10
2.2 Pajak Penghasilan	10
2.2.1 Pengertian PPh	10
2.2.2 Dasar Hukum PPh	11
2.2.3 Subjek PPh	11
2.2.4 Objek PPh	13
2.2.5 Tarif PPh	14
2.3 Pajak Pertambahan Nilai	15
2.3.1 Pengertian PPN	15
2.3.2 Dasar Hukum PPN	16
2.3.3 Subjek PPN	16
2.3.4 Objek PPN	17
2.3.5 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak	17
2.3.6 Penyerahan BKP dan JKP	18
2.3.7 Saat dan Tempat Terutangnya PPN	19
2.3.8 Faktur Pajak	20
2.3.9 Tarif PPN	21
2.4 Ekualisasi SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN	22
2.4.1 Pengertian Ekualisasi	22
2.4.2 Dasar Hukum Ekualisasi	23
2.4.3 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Perbedaan	24
2.4.3.1 Uang Muka	24
2.4.3.2 Barang Konsinyasi	24
2.4.3.3 Pemakaian Sendiri BKP/JKP	24
2.4.3.4 Cabang Belum Sentralisasi PPN	25
2.4.3.5 Potongan Penjualan	25
2.4.3.6 Retur Penjualan	25
2.4.3.7 Penjualan dalam Valuta Asing	26

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	27
3.2 Objek Penelitian	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.4.1 Jenis Data	28
3.4.2 Sumber Data	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Metode Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan	31
4.2 Visi dan Misi Perusahaan	31
4.3 Tujuan Perusahaan	32
4.4 Struktur Organisasi	33
4.5 Kegiatan Usaha Perusahaan	37
4.6 Kebijakan PT Padma Pacific Sukses	38
4.6.1 Dasar Penyajian Laporan Keuangan	38
4.6.2 Kas	38
4.6.3 Persediaan	38
4.6.4 Aktiva Tetap	39
4.6.5 Penghasilan	39
4.6.6 Transaksi Pembelian	39
4.6.7 Transaksi Retur Pembelian	39
4.6.8 Transaksi Penjualan	40
4.6.9 Transaksi Retur Penjualan dan Potongan Penjualan	40
4.6.10 Pemakaian Sendiri atau Pemberian Cuma-cuma atau Bonus	41
BAB V PEMBAHASAN	
5.1 Perbandingan Peredaran Bruto antara SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dengan Ketentuan Undang-undang	42
5.2 Ekualisasi Peredaran Usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN Setahun	44
5.3 Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Peredaran Usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN	45
5.3.1 Uang Muka	46
5.3.2 Barang Konsinyasi	46
5.3.3 Pemakaian Sendiri BKP/JKP	47
5.3.4 Cabang Belum Sentralisasi PPN	47
5.3.5 Potongan Penjualan	47
5.3.6 Retur Penjualan	48
5.3.7 Penjualan dalam Valuta Asing	48
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	50
6.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

	Tabel	Halaman
1.1	Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2010-2014	2
5.1	Perbandingan Peredaran Usaha antara Perusahaan dengan UU PPh 1984	43
5.2	Perbandingan Peredaran Usaha antara Perusahaan dengan UU PPN 1984	44

DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran	Halaman
1	Biodata	56
2	Peredaran Usaha Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan	58
3	Selisih Peredaran Usaha antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan	61
4	Laporan Keuangan	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang–Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP 1984),

“... pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.”

Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dibiayai dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2014 penerimaan sektor pajak mencapai 77% dari volume penerimaan negara. Peningkatan penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara pada tahun 2011-2014.

Peningkatan penerimaan pajak akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan negara sehingga pemerintah terus berupaya untuk memungut pajak semaksimal mungkin. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak sebagai *budgetair*. Pajak diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara dan digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan (Pudyatmoko, 2009:16). Sesuai

dengan fungsinya, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sebagian besar dananya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pelaksanaan pembangunan.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2010-2014 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Sumber Penerimaan				Jumlah	
	Perpajakan		Bukan Pajak			
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
2011	873,9	72%	331,5	28%	1.205,4	100%
2012	980,5	74%	351,8	26%	1.332,3	100%
2013	1.072,1	75%	349,2	25%	1.421,3	100%
2014	1.280,4	77%	385,4	23%	1.665,8	100%

Sumber: APBN, 2014 (diolah sendiri)

Pada tahun 1983 pemerintah menetapkan sistem *self-assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia melalui Undang-Undang KUP 1984 yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984 (Burton dan Ilyas, 2004:20). *Self assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak sendiri menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam hal ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Sistem *self assessment* yang diatur dalam UU KUP diterapkan berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

(selanjutnya disebut UU PPh 1984) dan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN 1984).

UU PPh mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib pajak merupakan subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (UU KUP1984, Pasal 2 ayat (1)).

UU PPN mengatur tentang pengenaan pajak atas konsumsi barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri atau daerah pabean (Ilyas 2012: 223). Pihak yang dibebani untuk membayar adalah konsumen sedangkan pihak yang diberi kewajiban untuk memungut PPN adalah penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan atau jasa. PPN hanya dipungut terhadap pertambahan nilai barang yang timbul karena digunakan dalam faktor produksi pada setiap jalur usaha perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan atau pemberian jasa kepada para konsumen yang dilakukan perusahaan dalam lingkup usahanya.

Setiap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali apabila penyerahan BKP atau JKP dilakukan di luar daerah pabean atau penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pihak yang ditunjuk menjadi pemungut PPN (wajib pungut PPN). Dalam transaksi dengan pemungut PPN, yang wajib memungut PPN atas pembelian BKP atau JKP adalah pemungut PPN.

Pengenaan PPN di Indonesia didasarkan atas faktur, sehingga setiap penyerahan BKP atau JKP oleh PKP harus dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak ini berfungsi sebagai bukti pungutan PPN dan atau PPnBM yang dibuat oleh PKP setiap melakukan penyerahan BKP atau JKP. PKP menyetorkan PPN ke kas negara hanya jika PPN keluaran lebih besar daripada PPN Masukan. Sedangkan, jika PPN Keluaran lebih kecil daripada PPN Masukan, kelebihan pembayaran ini dapat dikompensasikan untuk masa pajak selanjutnya atau diminta kembali (restitusi).

Dengan menggunakan metode *self assessment*, wajib pajak berkewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan menggunakan metode *self assessment*, diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan melakukan pembukuan (Mardiasmo, 2011:144). Wajib pajak diwajibkan melakukan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir.

Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan SPT PPh Badan, wajib pajak seharusnya memastikan bahwa seluruh peredaran usaha (omzet) telah dilaporkan, dan sudah dipungut PPN-nya. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus, maka wajib pajak dapat memberikan penjelasan. Tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan adalah memastikan bahwa wajib pajak telah menaati peraturan perpajakan yang berkaitan dengan PPh dan PPN dan bahwa peredaran usaha yang dilaporkan adalah benar.

Proses ekualisasi pertama kali diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-29/PJ/1995 tentang Replikasi Sistem Informasi Perpajakan. Proses ekualisasi dalam pemeriksaan sendiri telah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Ekualisasi dilakukan oleh fiskus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Namun, karena ada kemungkinan SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan diperiksa beberapa tahun kemudian, wajib pajak seharusnya membuat ekualisasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN setiap periode untuk memudahkan wajib pajak memberikan penjelasan yang rasional disertai dengan dasar hukum yang jelas kepada fiskus dalam hal dilakukan pemeriksaan.

Perusahaan yang menjadi topik penelitian adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang elektronik. Peneliti ingin mengetahui apakah peredaran bruto (peredaran usaha) sudah dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk memilih masalah perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dengan judul: **“Ekualisasi Peredaran Usaha antara Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN setahun sudah dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimana cara mengekualisasi peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN setahun?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN setahun?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bahwa peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN yang dilaporkan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui cara ekualisasi peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN setahun.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan total peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan total penyerahan menurut SPT Masa PPN setahun.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Perusahaan dapat memperoleh penjelasan mengenai perbedaan total peredaran usaha antara total SPT Masa PPN setahun dan SPT Tahunan PPh. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai salah satu alat kontrol manajemen dalam perhitungan, pengisian, pembayaran, dan pelaporan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan peneliti berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sebagai masukan, baik untuk bahan referensi dan bahan perbandingan antara teori dan praktik yang ada. Berguna untuk memberikan gambaran atau wawasan yang jelas tentang ekualisasi.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan	Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II Tinjauan Pustaka	Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep-konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.
BAB III Metode Penelitian	Bab ini berisi rancangan penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan

sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Perusahaan	Bab ini berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, struktur organisasi, kegiatan perusahaan, dan kebijakan perusahaan.
BAB V Pembahasan	Bab ini berisi perbandingan peredaran bruto dalam SPT tahunan PPh dan SPT Masa PPN setahun dengan ketentuan undang-undang, cara mengekualisasi peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN setahun, dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN Setahun.
BAB VI Penutup	Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peredaran Bruto

Peredaran bruto berdasarkan UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh 1984), adalah sebagai semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi :

1. penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final,
2. penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final, dan
3. penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Menurut Pardiati (2010:155), jumlah peredaran usaha adalah jumlah peredaran usaha menurut akuntansi yaitu jumlah penerimaan atau peredaran bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak (12 bulan) yang bersangkutan bagi perusahaan dagang dan perusahaan industri. Peredaran bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, adalah penghasilan dari usaha, tidak termasuk :

1. penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
2. penghasilan selain dari usaha atau penghasilan luar usaha/penghasilan lain-lain,

3. penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan,
4. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri,
5. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak/bukan objek pajak.

Peredaran bruto berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.42 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN 1984) tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Secara umum, penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu pada saat penyerahan produk, pada saat jasa selesai dilakukan dan dibuat fakturnya, sejalan dengan berlalunya waktu (bunga, royalti, sewa, dan penggunaan aset), dan pada tanggal penjualan. Dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang, seperti pada saat selesainya produksi, secara proporsional selama tahap produksi, dan saat pembayaran diterima.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1 Pengertian PPh

Menurut UU PPh 1984, pajak penghasilan adalah: "...pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak." Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang diatur dalam UU PPh 1984 pasal 4 ayat 1, yaitu

"... setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan."

Menurut Purwono (2010:86), pajak penghasilan adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.

2.2.2 Dasar Hukum PPh

Pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama UU No.7 Tahun 1991, perubahan kedua UU No. 10 Tahun 1994, perubahan ketiga UU No.17 Tahun 2000, dan perubahan terakhir pada tahun 2008 adalah Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur mengenai perlakuan pajak atas penghasilan, yang mencakup subjek pajak, objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tarif pajak penghasilan, cara perhitungan pajak penghasilan, sanksi pajak, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan.

2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang PPh 1984, subjek pajak dibedakan menjadi:

1. subjek pajak dalam negeri yaitu:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,

- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
2. subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Secara ringkas, dapat disimpulkan, subjek pajak adalah pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Berdasarkan Pasal 3 UU PPh 1984, terdapat pengecualian yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dan Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional (sesuai syarat no.3) dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.2.4 Objek PPh

Objek PPh dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Waluyo (2009:183), dilihat dari penggunaannya (*outflow*), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat juga ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak. Sedangkan, dilihat dari mengalirnya (*inflow*) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji honorarium, penghasilan dari praktik akuntan, dokter, dan sebagainya;

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tidak gerak seperti bunga, royalti, dividen, sewa, dan sebagainya; dan
4. penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan hutang, dan lain sebagainya.

2.2.5 Tarif PPh

Djuanda dan Lubis (2004:63) mengatakan bahwa dalam pemungutan pajak, tarif merupakan tolok ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*). Tarif PPh wajib pajak badan sejak tahun 2013 dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 digunakan untuk wajib pajak non BUT yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto dalam satu tahun pajak fiskal kurang dari Rp 4,8 miliar, perhitungan PPh mulai masa pajak Juli 2013 dihitung sebagai PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar 1 % dari peredaran bruto.
- b. Pasal 17 UU PPh 1984 digunakan untuk menghitung besarnya PPh badan yang terutang bagi wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, menetapkan tarif atas penghasilan kena pajak sebagai berikut.
 1. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tarif tunggal 25%.
 2. Tarif pajak khusus wajib pajak badan tertentu (Wahono, 2012:116) sebagai berikut:
 - a. untuk PT terbuka dengan saham yang dimiliki publik minimal 40% ada pengurangan tarif 5% (Pasal 17 (2b)) sehingga tarif menjadi 20%,

- b. untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.1 Pengertian PPN

Menurut Supramono dan Damayanti (2005:88), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan “pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP)”. PPN ini hanya dikenakan terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada mata rantai usaha perusahaan. Pertambahan nilai timbul karena digunakannya faktor produksi pada setiap mata rantai usaha perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen serta dari semua biaya yang timbul untuk memperoleh atau mempertahankan laba.

PPN merupakan pajak tidak langsung karena PPN dipungut oleh penjual dari pembeli ketika terjadi penyerahan BKP maupun JKP. Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN, maka PPN sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli. Dengan begitu, pemerintah tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada pembeli atau penerima jasa.

2.3.2 Dasar Hukum PPN

Indonesia mengadopsi PPN sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang berlaku sejak tahun 1951. Mulai sejak berlakunya PPN, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 ini telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.3.3 Subjek PPN

Menurut Resmi (2011:5), PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Subjek PPN adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang PPN, terdiri dari:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP,
2. bukan PKP yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN, seperti impor BKP, pemanfaatan BKP atau JKP di dalam daerah pabean, atau melakukan kegiatan membangun sendiri.

2.3.4 Objek PPN

Objek PPN sebagaimana ditetapkan dalam UU PPN 1984 adalah sebagai berikut:

1. pasal 4 UU PPN 1984,
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. pasal 16C UU PPN 1984, yang dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau oleh pihak lain, untuk tempat tinggal atau tempat usaha,
3. pasal 16D UU PPN 1984, yang dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

2.3.5 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo (2009:259), Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Menurut Soemarso S.R (2007:539) secara umum, UU PPN menganut prinsip *negative list* yang menganggap bahwa semua barang adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan

semua jasa adalah Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali apabila UU PPN menetapkan lain. Dalam pasal 4A, UU PPN 1984 menetapkan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (non-BKP dan non-JKP).

Kelompok barang yang ditetapkan sebagai non-BKP berdasarkan pasal 4A UU PPN 1984 adalah sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Sementara kelompok jasa yang ditetapkan sebagai non-JKP berdasarkan pasal 4A UU PPN 1984 adalah sebagai berikut:

- a. jasa dibidang pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa dibidang pelayanan sosial;
- c. jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. jasa dibidang keagamaan;
- f. jasa dibidang pendidikan;
- g. jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. jasa dibidang tenaga kerja;
- k. jasa dibidang perhotelan;
- l. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

2.3.6 Penyerahan BKP dan JKP

Yang dimaksud dengan penyerahan adalah penyerahan hak, pengalihan hak atas barang, pemakaian sendiri, dan penyerahan lainnya seperti penyerahan karena konsinyasi. Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN 1984 adalah:

- a. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
- e. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

- f. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;
- g. penyerahan BKP secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau JKP yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak. Pemakaian JKP untuk kepentingan sendiri atau pemberian JKP secara cuma-cuma termasuk dalam pengertian penyerahan JKP, dengan pertimbangan untuk mempertahankan adanya perlakuan yang sama sebagaimana halnya pada pemakaian Barang Kena Pajak untuk kepentingan sendiri atau penyerahan barang secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak.

Suatu penyerahan dikatakan sebagai penyerahan BKP/JKP, bila memenuhi keempat syarat sebagai berikut:

- 1. penyerahan dilakukan oleh PKP atau pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP,
- 2. barang yang diserahkan merupakan BKP atau jasa yang diserahkan merupakan JKP,
- 3. penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
- 4. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2.3.7 Saat dan Tempat Terutangnya PPN

Menurut Djuanda dan Lubis (2004:360), saat terutangnya PPN sangat penting dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, penentuan saat terutangnya PPN perlu diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya, PPN dipungut berdasarkan prinsip:

1. prinsip akrual, PPN dikatakan terutang pada saat penyerahan barang, jasa, atau impor dilakukan, meskipun pembayaran belum atau belum sepenuhnya diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 1984,
2. prinsip kas, PPN dikatakan terutang pada saat penerimaan, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU PPN 1984.

Tempat pajak terutang berdasarkan Pasal 12 UU PPN 1984 adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan. Atas pemberitahuan secara tertulis dari PKP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.

2.3.8 Faktor Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (Pohan, 2013:189). Faktur pajak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN 1984 menyebutkan saat pembuatan faktur pajak adalah :

1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 13 ayat (2a) UU PPN 1984 menetapkan, untuk faktur pajak yang dibuat meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP/JKP yang

sama selama satu bulan kalender, faktur pajak harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan UU PPN 1984 Pasal 13 ayat (5), faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

2.3.8 Tarif PPN

Tarif PPN diatur dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 7 UU PPN 1984. Dalam Pasal 7 ayat (1), tarif PPN ditetapkan sebesar 10%. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU PPN 1984, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:

- a. ekspor BKP berwujud,
- b. ekspor BKP tidak berwujud,
- c. ekspor JKP.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Besarnya PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984

menyebutkan Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Ilyas,2012:224).

2.4 Ekualisasi PPh dan PPN

2.4.1 Pengertian Ekualisasi

Ekualisasi PPN dan PPh adalah salah satu cara untuk membantu fiskus melihat sejauh mana kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan indikasi setiap wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Menurut Muljono (2009:172), Direktorat Jenderal Pajak akan menganggap laporan wajib pajak melalui SPT-nya diragukan kebenarannya apabila berdasarkan analisis fiskus, laporan wajib pajak memiliki kecenderungan untuk tidak benar. Analisis yang dilakukan fiskus atas laporan pada SPT wajib pajak dapat dilakukan dengan membandingkan data yang dimiliki wajib pajak sendiri, seperti perbandingan biaya gaji dengan pemotongan PPh dan perbandingan peredaran usaha antara laporan laba/rugi dengan DPP PPN; atau membandingkannya dengan data yang dimiliki wajib pajak lain yang memiliki usaha sejenis, seperti perbandingan tingkat laba, perbandingan harga pokok penjualan, dan perbandingan biaya usaha.

Terkait dengan istilah penjualan dalam PPh dan penyerahan dalam PPN terdapat perbedaan pengertian yakni semua transaksi penjualan bruto merupakan penyerahan dalam PPN namun tidak semua penyerahan dalam PPN merupakan penjualan bruto dalam PPh. Penjualan dalam PPh merupakan pengalihan kepemilikan. PPN memakai istilah penyerahan yang artinya segala bentuk penyerahan merupakan objek PPN baik penyerahan kepada pihak ketiga maupun kepada pihak perusahaan sendiri.

Perbedaan dalam omzet antara SPT PPh Badan dan total SPT Masa PPN setahun harus diketahui penyebabnya. Oleh karena itu, proses ekualisasi bukan proses untuk menemukan angka yang sama antara kedua SPT tersebut, melainkan untuk mengetahui penyebab perbedaan peredaran usaha perusahaan antara SPT Tahunan PPh dan total SPT Masa PPN setahun. Penyebab perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan oleh wajib pajak yang melaporkan SPT tersebut.

Menurut Suandy (2008:140), ekualisasi atau rekonsiliasi SPT harus dilakukan perusahaan secara periodik antara rekening-rekening yang ada di SPT PPh badan, SPT PPh Pasal 21, dan SPT PPN. Jika ada perbedaan segera dapat dilakukan koreksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengenaan sanksi.

2.4.2 Dasar Hukum Ekualisasi

Dalam peraturan perpajakan, ekualisasi data PPh dan PPN pertama kali diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-29/PJ/1995 tentang Replikasi Sistem Informasi Perpajakan. Di dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memerintahkan kepada setiap Kantor Pelayanan Pajak melakukan ekualisasi data PPh dan PPN. Proses ekualisasi dalam pemeriksaan sendiri telah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan.

2.4.3 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Perbedaan

2.4.3.1 Uang Muka

Uang muka adalah pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memenuhi kewajiban, misalnya kepada penjual yang belum menyerahkan barangnya atau pembayaran sebagian dari harga yang telah disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat. Penerimaan uang muka, sudah terutang PPN tetapi belum merupakan penjualan.

2.4.3.2 Barang Konsinyasi

Barang konsinyasi adalah barang yang telah diserahkan kepada *consignee* tetapi merupakan kepemilikan dari *consignor* dan dimasukkan dalam persediaan *consignor* sebesar harga beli atau biaya produksi (Agoes, 2013:55). Pengiriman barang konsinyasi untuk dijual sudah terutang PPN, tetapi belum merupakan penjualan. Penjualan diakui setelah realisasi penjualan dilaporkan komisioner.

2.4.3.3 Pemakaian Sendiri BKP/JKP

Pemakaian sendiri BKP atau JKP untuk tujuan produktif tidak terutang PPN. Pemakaian sendiri bukan untuk tujuan produksi, misalnya diberikan kepada pegawai, pemberian cuma-cuma baik yang dilakukan tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual (barang promosi) atau disumbangkan, terutang PPN (PPN Keluaran) berdasarkan harga jual dikurangi laba kotor (dalam praktiknya dihitung berdasarkan harga pokok). Transaksi ini bukan merupakan penghasilan tetapi mengurangi persediaan atau harga pokok penjualan dan harus dibuatkan faktur pajak. PPN masukan transaksi ini tidak dapat dikreditkan.

2.4.3.4 Cabang Belum Sentralisasi PPN

PKP yang mempunyai cabang termasuk lokasi usaha, perwakilan atau unit pemasaran yang belum atau tidak mendapat persetujuan sentralisasi PPN, penyerahan atau pengiriman BKP dari kantor pusat ke cabang sudah terutang PPN tetapi belum merupakan penjualan dalam PPh. Penjualan diakui dalam PPh apabila sudah ada realisasi penjualan kepada pihak ketiga dan PPh dilaporkan secara sentralisasi.

Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk penyerahan PPN atas penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

2.4.3.5 Potongan Penjualan

Potongan penjualan yang dicantumkan dalam faktur pajak mengurangi DPP PPN dan mengurangi peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh. Potongan penjualan yang diberikan setelah faktur pajak dibuat, tidak dapat mengurangi DPP PPN, tetapi mengurangi jumlah peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh.

2.4.3.6 Retur Penjualan

Retur penjualan yang dibuatkan nota retur PPN akan mengurangi jumlah penyerahan dalam SPT Masa PPN dan mengurangi jumlah peredaran usaha dalam SPT PPh. Syarat membuat nota retur PPN harus merujuk nomor seri faktur pajak atas barang yang dikembalikan. Jika pada waktu distributor mengembalikan barang ke pabrik dengan membuat faktur pajak standar, hal ini

tidak akan mengurangi jumlah penyerahan di pabrik, tetapi mengurangi peredaran usaha karena dibukukan sebagai retur penjualan.

2.4.3.7 Penjualan dalam Valuta Asing

Penjualan yang menggunakan kurs valas dalam menghitung DPP PPN harus menggunakan nilai kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan (berdasarkan Pasal 11 PP No.143 Tahun 2000) pada saat pembuatan faktur pajak. Sedangkan, untuk menghitung PPh Badan harus menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi sesuai dengan paragraf 20 ED PSAK No. 10. Tanggal transaksi yang dimaksud adalah tanggal pada saat pertama kali suatu transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan kurs ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam nilai rupiah dari peredaran usaha menurut SPT PPh dan total penyerahan menurut SPT PPN.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkap suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan perusahaan, peredaran usaha menurut SPT Tahunan PPh dan penyerahan menurut SPT Masa PPN selama satu tahun.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Padma Pacific Sukses. PT Padma Pacific Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang elektronik yang pada saat penelitian dilakukan berlokasi di Jl. Ir. Sutami Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok K2 No.16, Makassar.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan data berikut.

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak

perusahaan. Wawancara dilakukan dengan pegawai PT Padma Pacific Sukses yang mengerti permasalahan pajak yang dibahas dalam penelitian (manajer keuangan dan akuntan internal). Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dilakukan melalui tatap muka maupun via telepon.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari pengetahuan teoretis yaitu data sekunder melalui buku maupun wacana yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data kepustakaan yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data ini kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan data laporan keuangan perusahaan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dapat diperoleh dengan melihat kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, rencana perusahaan, dan kebijakan perusahaan. Data kuantitatif dapat diperoleh melalui dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan, SPT Tahunan PPh perusahaan tahun 2014, dan SPT Masa PPN selama tahun 2014.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak perusahaan PT Padma Pacific Sukses (manajer keuangan dan akuntan) yang mengetahui tentang ketentuan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bersedia memberikan informasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku, peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku, dan laporan keuangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. teknik observasi, dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu PT Padma Pacific Sukses Makassar untuk memperoleh data yang relevan;

2. teknik *interview*, dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan manajer keuangan dan akuntan perusahaan untuk memperoleh data.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptif-comparative*, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan perbandingan peredaran usaha terhadap hasil perhitungan menurut SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN setahun dari perusahaan. Kemudian diolah lebih lanjut untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan peredaran usaha yang timbul.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Padma Pacific Sukses adalah perusahaan dagang yang berbadan hukum berdiri sejak tahun 1995, yang berlokasi di Jalan Bulusaraung No.73, Makassar. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik dan merupakan *dealer* resmi dari beberapa merk barang elektronik yang ada di pasaran. Pendirian PT Padma Pacific Sukses ditetapkan pada tanggal 23 Januari tahun 1995 dihadapan notaris Sitske Limowa, S.H. di Makassar, dengan nomor akte 131.

Perkembangan usaha PT Padma Pacific Sukses membutuhkan lokasi yang lebih lapang. Pada tahun 1996, tempat usaha PT Padma Pacific Sukses dipindahkan ke Jalan Andalas No.178, Makassar. Lokasi tersebut digunakan sebagai *showroom* sekaligus gudang oleh perusahaan. Pada tahun 2014, karena adanya peraturan pemerintah yang melarang adanya gudang di kota, sehingga tempat usaha dipindahkan lagi ke pusat perdagangan Parangloe, tepatnya di Jl. Ir. Sutami Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok K2 No.16, Makassar.

4.2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT Padma Pacific Sukses adalah menjadi perusahaan penyedia barang elektronik terbaik di Indonesia. Misi PT Padma Pacific Sukses adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan solusi barang elektornik yang berkesinambungan,

2. membangun jejaring kerjasama untuk menumbuhkan industri digital di Indonesia, dan
3. memberikan manfaat bagi mitra, pelanggan, dan seluruh *stakeholder*.

4.3. Tujuan Perusahaan

Tujuan umum PT Padma Pacific Sukses adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Selain tujuan umum, perusahaan memiliki tujuan khusus yang terbagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu yang relatif singkat (1-3 tahun) agar mampu bersaing dengan perusahaan sejenis saat ini. Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai perusahaan adalah sebagai berikut:

1. mencapai target penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya,
2. mencapai laba maksimal,
3. menjaga posisi perusahaan agar tetap mampu bersaing, dan
4. meningkatkan mutu pelayanan konsumen dan pemenuhan kebutuhan konsumen dengan perbedaan strategi.

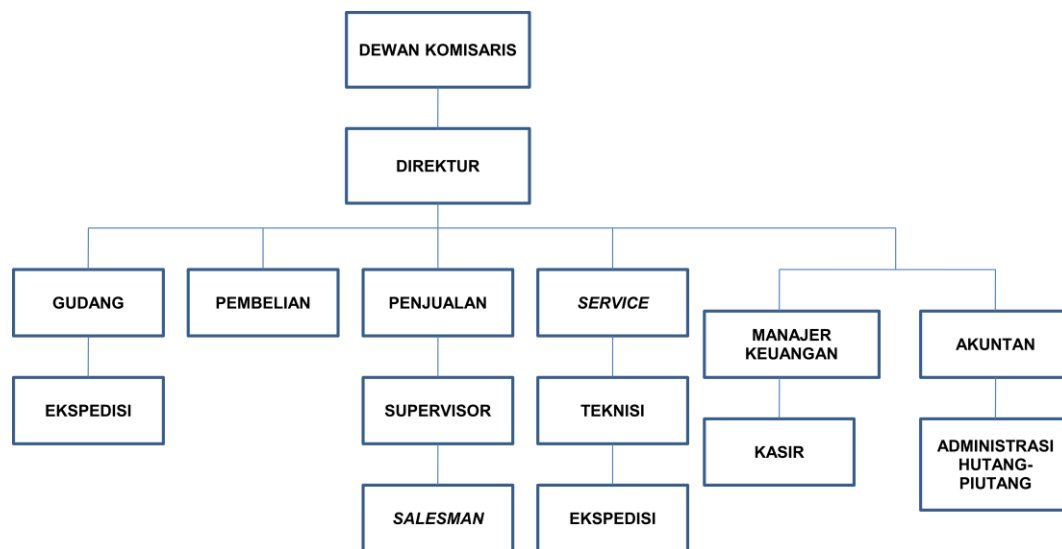
Tujuan jangka panjang merupakan kelanjutan dari tujuan jangka pendek perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang diharapkan tercapai dalam kurun waktu 20-25 tahun mendatang agar keberadaan perusahaan tetap terjaga. Tujuan jangka panjang perusahaan antara lain:

1. menjaga kontinuitas perusahaan dalam menjalankan usahanya,
2. meningkatkan volume penjualan,
3. memperbaiki kualitas perusahaan agar tetap mampu bersaing,
4. memperbaiki produk cacat yang sudah ada, dan

5. meningkatkan kesejahteraan karyawan.

4.4. Struktur Organisasi

Adanya struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Suatu perusahaan akan berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat suatu sistem kerja sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas. PT Padma Pacific Sukses memiliki karyawan sebanyak 63 orang. Struktur organisasi PT Padma Pacific Sukses dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1

Tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam struktur organisasi di atas, sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab komisaris adalah sebagai berikut:

1. menentukan dan menyetujui siapa saja yang akan menduduki jabatan direksi dan dewan direktur,
2. mempertimbangkan dan menyetujui perencanaan yang dilakukan direktur utama, dan
3. memantau perkembangan perusahaan.

2. Direktur

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut:

1. menetapkan wewenang dan tugas dari masing-masing bagian dan karyawan,
2. melaksanakan program kerja perusahaan dengan berpedoman pada rencana anggaran belanja dan pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan
3. menerima dan mengevaluasi laporan dari masing-masing bagian dalam perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan baik intern maupun ekstern sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

3. Bagian Gudang dan Ekspedisi

Tugas dan tanggung jawab bagian gudang dan ekspedisi adalah sebagai berikut:

1. mengawasi ketertiban dan keamanan gudang,
2. mengawasi lalu lintas barang,

3. menyiapkan dan menyerahkan barang kepada petugas pengiriman barang berdasarkan faktur yang telah dibuat oleh bagian administrasi hutang-piutang,
4. melayani penerimaan barang berdasarkan faktur pembelian yang disahkan oleh bagian yang berwenang dan memasukkan datanya ke komputer, dan
5. mengatur penyimpanan barang di gudang.

4. Bagian Pembelian

Tugas dan tanggung jawab bagian pembelian adalah sebagai berikut:

1. mencari jenis-jenis barang yang laku di pasaran, kemudian memesan barang tersebut dari produsen,
2. memesan barang-barang yang telah habis di gudang dan masih diminta oleh pelanggan, dan
3. menerima informasi dari bagian penjualan mengenai jenis barang yang sudah mencapai posisi *peak* di pasaran, sehingga tidak perlu dibeli lagi.

5. Bagian Penjualan

Tugas dan tanggung jawab bagian penjualan adalah sebagai berikut:

1. supervisor memantau para *salesman*-nya berkaitan dengan penjualan yang telah dicapai melalui laporan penjualan dan daftar kunjungan toko, dan
2. *salesman* harus aktif menghubungi toko-toko langganannya untuk mengetahui perkembangan dan tingkat permintaan barang-barang PT Padma Pacific Sukses di toko tersebut.

6. Bagian Service

Tugas dan tanggung jawab bagian servis adalah sebagai berikut:

1. teknisi bertanggung jawab memperbaiki barang yang rusak,
2. mencatat barang rusak yang masuk dan memperbaikinya, kemudian dikembalikan kepada konsumen, dan
3. menyiapkan barang yang telah diperbaiki (baik yang dapat diperbaiki maupun yang tidak dapat diperbaiki) kepada petugas pengiriman berdasarkan surat keterangan servis dari teknisi.

7. Bagian Administrasi dan Umum

Tugas dan tanggung jawab bagian administrasi dan umum adalah sebagai berikut:

1. manajer keuangan harus aktif dalam memantau aktivitas pembukuan, membantu tiap bagian dalam perusahaan dalam menyusun anggaran tahunan, memberi nasihat dalam perencanaan pajak (*tax planning*),
2. kasir bertugas mengawasi perputaran keuangan, mengambil dan menyetorkan uang ke bank, dan mengatur penerimaan dan pencairan cek,
3. akuntan menyelenggarakan pembukuan, menerbitkan laporan keuangan, mengurus pembayaran dan pelaporan pajak perusahaan, dan
4. administrasi hutang-piutang mengatur pemberian kredit, penagihan, dan pembayaran hutang agar tepat waktu.

4.5. Kegiatan Usaha Perusahaan

PT Padma Pacific Sukses adalah perusahaan yang memperdagangkan barang-barang elektronik meliputi televisi, kulkas, mesin cuci, dan *speaker active* berbagai merek. Perusahaan melakukan penjualan secara langsung terhadap barang-barang dagangannya kepada PKP maupun non PKP. Pembelian barang dagangan ini dilakukan dengan pembelian langsung dari pabrik pemasok yang merupakan produsen resmi tanpa perantara. Pembelian dilakukan oleh bagian pembelian berdasarkan data yang diperoleh dari bagian penjualan bilamana barang yang ingin dipesan masih diminta di pasaran. Jadi, pemasok hanya mengirimkan barang kepada perusahaan berdasarkan permintaan perusahaan.

Barang dagangan yang diterima dari pemasok kemudian dihitung dan dimasukkan ke dalam gudang. Pegawai gudang kemudian memasukkan jumlah barang ke dalam komputer setelah pencocokan jumlah barang dengan pesanan pembelian, tanpa mengecek kondisi barang. Pengecekan kondisi barang tidak dilakukan agar barang dapat langsung dijual, mengingat perputaran persediaan dan siklus penjualan terjadi setiap hari.

Transaksi PT Padma Pacific Sukses dapat terjadi secara kredit dan tunai. Transaksi penjualan dapat berdasarkan pesanan dari pedagang eceran maupun dari konsumen akhir yang langsung datang ke toko. Transaksi penjualan diakui sebagai penghasilan pada saat faktur pajak diterbitkan atau selambat-lambatnya akhir bulan setelah penyerahan barang.

PT Padma Pacific Sukses tidak melakukan retur pembelian maupun retur penjualan. Retur pembelian tidak dilakukan untuk meminimumkan biaya pengiriman perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menyediakan bagian servis untuk memperbaiki barang yang rusak atau cacat. Apabila barang dagangan yang dibeli rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, pemasok akan memberi

potongan harga. Apabila barang dagangan yang dijual rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, perusahaan akan menukar barang tersebut dengan barang sejenis atau barang lain dengan harga yang sama.

4.6. Kebijakan PT Padma Pacific Sukses

4.6.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

PT Padma Pacific Sukses menyusun laporan keuangan setiap akhir bulan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Perusahaan menyusun laporan keuangan dengan tujuan agar mudah dipahami dan dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dengan dasar akrual dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

4.6.2. Kas

Kas adalah aktiva lancar perusahaan yang terdiri dari uang kertas, uang logam, dan kertas berharga yang mempunyai sifat seperti uang. Akun kas perusahaan meliputi kas yang ada di perusahaan (*cash on hand*) dan kas di bank (*cash on bank*).

4.6.3. Persediaan

Penilaian persediaan menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata (*average*). Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode periodik.

4.6.4. Aktiva Tetap

Aktiva tetap perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tersebut.

4.6.5 Penghasilan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyatakan bahwa penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Sumber penghasilan perusahaan berasal dari penjualan barang dagangan baik secara grosir maupun eceran. Penjualan diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli.

4.6.6 Transaksi Pembelian

Perusahaan melakukan transaksi pembelian dari pemasok yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan sistem *order* atau pesanan. Sebagian besar pembelian dilakukan secara kredit dengan masa pembayaran kurang lebih 30 hari sampai dengan 45 hari. Namun, perusahaan dapat juga melakukan pembelian secara tunai.

4.6.7 Transaksi Retur Pembelian

Perusahaan tidak melakukan retur pembelian dengan pertimbangan untuk meminimalisasi biaya pengiriman, mengingat ukuran dan berat barang dagangan yang cukup besar sehingga biaya pengiriman juga besar. Oleh karena itu, perusahaan, menyediakan divisi *service*. Bila barang tersebut rusak atau cacat dan tidak dapat diperbaiki maka pemasok akan memberi potongan harga.

Potongan harga ini tidak mengubah faktur pajak pada pembelian bulan ini, tetapi akan dipotong langsung pada faktur pajak bulan berikutnya.

4.6.8 Transaksi Penjualan

Penjualan dilakukan berdasarkan sistem pesanan. Barang dagangan yang telah didata di komputer, kemudian disiapkan oleh bagian gudang untuk dikirimkan ke toko pada hari yang sama pada saat pesanan. Barang dagangan dijual secara langsung kepada konsumen tanpa adanya pihak perantara. Konsumen yang berada diluar kota Makassar, wajib membayar uang muka terlebih dahulu untuk memperoleh BKP yang telah dipesan kepada perusahaan. Proses penjualan kepada pedagang eceran baik PKP maupun non PKP. Penjualan dilakukan secara kredit dengan masa pembayaran 30 hari sampai 45 hari. Perusahaan memberikan masa pembayaran penjualan sama dengan masa pembayaran pembelian karena kondisi persaingan usaha yang dihadapi perusahaan. Namun, penjualan juga dapat dilakukan secara tunai.

4.6.9 Transaksi Retur Penjualan dan Potongan Penjualan

Perusahaan tidak menerima retur penjualan. Apabila ada barang dagangan yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen atau barang tersebut rusak atau cacat maka pihak perusahaan bersedia memperbaiki barang tersebut maupun menukar barang tersebut dengan barang sejenis atau barang dengan harga yang sama bila barang tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan syarat kurang dari 2 minggu setelah penyerahan barang dan barang masih dalam kondisi lengkap.

Untuk potongan penjualan, perusahaan memberikan kebijakan bahwa potongan penjualan yang diberikan langsung untuk beberapa produk tertentu berkisar 3,5%-5% yang diberikan pada saat faktur pajak dibuat. Potongan penjualan ini, dicatat dalam akun potongan penjualan. Sedangkan untuk potongan penjualan sebesar 1% yang diberikan karena pembayaran yang lebih cepat yang dilakukan oleh pelanggan, dibukukan sebagai diskon penjualan dan dimasukkan ke dalam komponen biaya usaha dalam laporan rugi/laba.

4.6.10 Pemakaian Sendiri atau Pemberian Cuma-cuma atau Bonus

Perusahaan akan memberikan bonus kepada pelanggannya (pedagang eceran) sekitar 1 sampai 2 buah dalam hal promosi barang dagangannya. Bonus ini diklasifikasikan sebagai biaya bonus/pemasaran dalam laporan rugi/laba. Pemberian bonus cuma-cuma ini akan dicatat pada laporan rugi/laba pada akun penjualan dan dibuatkan faktur pajak dengan DPP sebesar harga pokok barang.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Perbandingan Peredaran Bruto antara SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dengan Ketentuan Undang-undang

PT Padma Pacific Sukses adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan barang elektronik yang merupakan *dealer* resmi dari beberapa merek barang-barang elektronik yang terdaftar di Indonesia. Sebagai *dealer* resmi, perusahaan ini menyalurkan barang dari produsen ke pedagang eceran dan konsumen akhir. Namun, sejak tahun 2000, sebagian besar penyaluran barang dagangan perusahaan dilakukan kepada pedagang eceran baik PKP maupun non PKP.

Perusahaan mengakui penjualan sebagai peredaran usaha pada saat penyerahan BKP. Tabel 5.1, menunjukkan bahwa terdapat selisih peredaran usaha antara perusahaan dengan UU PPh 1984. Perbedaan peredaran usaha ini disebabkan oleh bonus cuma-cuma dan diskon penjualan. Perusahaan mencatat bonus cuma-cuma yang diberikan kepada pelanggan sebagai komponen dari akun penjualan. Selain itu, diskon penjualan yang diberikan karena pembayaran yang lebih cepat oleh pelanggan tidak dikurangkan dengan penjualan, tetapi dimasukkan sebagai komponen biaya usaha. Dengan demikian, peredaran usaha yang dilaporkan oleh perusahaan pada SPT Tahunan PPh Badan belum sesuai dengan ketentuan UU PPh 1984. Perhitungan peredaran usaha sesuai dengan UU PPh 1984 dapat dilihat pada lampiran 2.

Tabel 5.1

**Perbandingan Peredaran Usaha antara Perusahaan dengan UU PPh 1984
PT Padma Pacific Sukses Tahun 2014 (dalam Rupiah)**

Bulan	Peredaran Usaha Menurut Perusahaan	Peredaran Usaha Menurut UU PPh 1984	Selisih Peredaran Usaha
Januari	1.533.819.229,00	1.532.415.976,97	1.403.252,03
Februari	1.430.113.593,00	1.428.813.202,48	1.300.390,52
Maret	897.902.844,00	897.081.037,21	821.806,79
April	1.068.308.577,00	1.067.331.139,76	977.437,24
Mei	1.277.807.786,00	1.276.638.790,64	1.168.995,36
Juni	1.664.881.453,00	1.661.425.971,09	3.455.481,91
Juli	1.194.246.245,00	1.189.785.471,14	4.460.773,86
Agustus	1.896.949.630,00	1.890.893.903,89	6.055.726,11
September	1.547.601.611,00	1.543.776.119,60	3.825.491,40
Oktober	1.472.205.322,00	1.470.858.501,59	1.346.820,41
November	1.399.013.038,00	1.397.733.049,20	1.279.988,80
Desember	1.541.780.103,00	1.540.369.640,89	1.410.462,11
Total	16.924.629.431,00	16.897.122.804,47	27.506.626,53

Sumber: PT Padma Pacific Sukses, 2014 (diolah sendiri)

Pelaporan SPT Masa PPN, mensyaratkan perusahaan untuk menerbitkan faktur pajak pada saat penyerahan BKP atau pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP. Sejak berdirinya PT Padma Pacific Sukses, faktur pajak selalu diterbitkan pada saat penyerahan BKP, saat pembayaran, atau paling lambat pada akhir bulan penyerahan. Tabel 5.2, menunjukkan bahwa perusahaan telah melaporkan seluruh penyerahan sesuai dengan ketentuan UU PPN 1984 selama tahun 2014, kecuali bulan Agustus. Pada bulan Agustus 2014, terdapat selisih peredaran usaha sebesar Rp 30.000.000,00. Pada bulan Agustus 2014, perusahaan melakukan penjualan atas aktiva tetap (kendaraan) yang digunakan dan memperoleh laba sebesar Rp 30.000.000,00, tetapi perusahaan tidak memungut PPN-nya.

Tabel 5.2

**Perbandingan Peredaran Usaha antara Perusahaan dengan UU PPN 1984
PT Padma Pacific Sukses Tahun 2014 (dalam Rupiah)**

Bulan	Peredaran Usaha Menurut Formulir 1111	Peredaran Usaha Menurut UU PPN 1983	Selisih Peredaran Usaha
Januari	1.542.419.229,00	1.542.419.229,00	-
Februari	1.421.513.593,00	1.421.513.593,00	-
Maret	897.902.844,00	897.902.844,00	-
April	1.068.308.577,00	1.068.308.577,00	-
Mei	1.277.807.786,00	1.277.807.786,00	-
Juni	1.679.881.453,00	1.679.881.453,00	-
Juli	1.179.246.245,00	1.179.246.245,00	-
Agustus	1.873.349.630,00	1.903.349.630,00	30.000.000,00
September	1.541.201.611,00	1.541.201.611,00	-
Oktober	1.472.205.322,00	1.472.205.322,00	-
November	1.399.013.038,00	1.399.013.038,00	-
Desember	1.578.480.103,00	1.578.480.103,00	-
Total	16.931.329.431,00	16.961.329.431,00	30.000.000,00

Sumber: PT Padma Pacific Sukses, 2014 (diolah sendiri)

5.2 Ekualisasi Peredaran Usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN Setahun

Wajib pajak sering tidak memahami bahwa ekualisasi peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN merupakan hal yang sangat penting. Ekualisasi akan menjadi alat yang sangat berguna bagi wajib pajak untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN saat pemeriksaan dilakukan oleh fiskus. Sebelum melakukan ekualisasi peredaran usaha, perlu dipersiapkan semua data dan dokumen yang berkaitan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses ekualisasi adalah sebagai berikut:

1. mengumpulkan data penjualan (peredaran usaha) pada buku besar yang dicatat berdasarkan PSAK yang berlaku yang menjadi acuan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan,
2. mengumpulkan data penyerahan (peredaran usaha) pada SPT PPN yang dicatat dan dilaporkan perusahaan sesuai dengan UU PPN 1984,
3. membandingkan seluruh penjualan yang didapat peneliti,
4. mencari faktor-faktor yang menyebabkan selisih penjualan yang diakui pada buku besar perusahaan dengan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan perusahaan, dan
5. menganalisa faktor-faktor penyebab selisih dengan aturan perpajakan yang berlaku.

5.3 Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Peredaran Usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN

Ekualisasi peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN setahun sangat penting dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan peredaran usaha yang dilaporkan menurut SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Selisih peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN dapat dilihat pada lampiran 3. Terdapat selisih peredaran usaha pada bulan Januari dan Februari sebesar Rp8.600.000,00, bulan Juni dan Juli sebesar Rp 15.000.000,00, pada bulan Agustus sebesar Rp 23.600.000,00, September sebesar Rp 6.400.000,00 dan bulan Desember Rp 36.700.000,00. Perbedaan peredaran usaha ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

5.3.1. Uang Muka

Pelanggan dari luar kota Makassar wajib membayar uang muka untuk memperoleh BKP yang telah dipesan kepada perusahaan. Pada bulan Januari, perusahaan menerima uang muka dari pelanggan sebesar Rp 8.600.000,00. Pada bulan Juni, perusahaan menerima uang muka dari pelanggan sebesar Rp 15.000.000,00. Pada bulan Agustus, perusahaan menerima uang muka sebesar Rp 6.400.000,00. Sedangkan, untuk bulan Desember 2014, perusahaan menerima uang muka sebesar Rp 36.700.000,00. Transaksi ini telah terutang PPN sebesar Rp 860.000,00 pada bulan Januari, Rp 1.500.000,00 pada bulan Juni, Rp 640.000,00 pada bulan Agustus, dan Rp 3.670.000,00 pada bulan Desember. Dengan demikian, terdapat perbedaan peredaran usaha sebesar Rp 8.600.000,00 pada bulan Januari dan Februari, Rp 15.000.000,00 pada bulan Juni dan Juli, Rp 6.400.000,00 pada bulan Agustus dan September, dan Rp 36.700.000,00 pada bulan Desember 2014 dan Januari 2015 antara SPT Tahunan PPh Badan dan total SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses. Selisih peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 dengan SPT Masa PPN setahun tahun 2014 yang disebabkan dari uang muka sebesar Rp 36.700.000,00.

5.3.2. Barang Konsinyasi

PT Padma Pacific Sukses tidak pernah menitipkan barang dagangannya untuk dijual. Oleh karena tidak ada barang konsinyasi, maka tidak menimbulkan perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses.

5.3.3. Pemakaian Sendiri atau Pemberian Cuma-cuma BKP/JKP

PT Padma Pacific Sukses melakukan pencatatan atas pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma BKP/JKP pada akun bonus. Bonus diklasifikasikan sebagai biaya promosi/pemasaran dalam laporan laba/rugi. Pemberian bonus ini akan dicatat pada akun penjualan. Transaksi pemberian bonus cuma-cuma yang dilakukan perusahaan, memengaruhi peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Dengan demikian, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma yang diberikan perusahaan tidak menimbulkan perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses.

5.3.4. Cabang Belum Sentralisasi PPN

PT Padma Pacific Sukses saat ini belum memiliki cabang, sehingga tidak memiliki transaksi dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Oleh karena itu, faktor ini tidak menyebabkan perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses.

5.3.5. Potongan Penjualan

Potongan penjualan yang dicantumkan dalam faktur pajak mengurangi DPP PPN dan mengurangi peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh. Untuk potongan penjualan karena pembayaran yang lebih cepat oleh pelanggan, dikelompokkan sebagai biaya diskon penjualan yang merupakan komponen biaya usaha. Diskon penjualan ini tidak memengaruhi peredaran usaha dalam

SPT Tahunan PPh Badan. Dengan demikian, potongan penjualan bukan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses. Perusahaan sebaiknya menggolongkan beban diskon penjualan sebagai pengurang pendapatan, sehingga peredaran usaha yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan UU PPh 1984.

5.3.6. Retur Penjualan

PT Padma Pacific Sukses tidak memberikan kebijakan kepada konsumennya untuk melakukan retur penjualan, tetapi perusahaan akan memberi pelayanan garansi. Dengan demikian, retur penjualan tidak akan menimbulkan perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan total SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses.

5.3.7. Penjualan dalam Valuta Asing

PT Padma Pacific Sukses sebagai distributor dan *retailer* barang elektronik tidak menggunakan mata uang asing dalam transaksinya. Jadi, perbedaan ketentuan yang menyebabkan selisih kurs tidak menimbulkan perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan total SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses.

Selain itu, pada bulan Agustus 2014, PT Padma Pacific Sukses menjual aktiva tetapnya dan memperoleh laba sebesar Rp 30.000.000,00. Transaksi ini seharusnya terutang PPN, tetapi perusahaan tidak memungut PPN atas transaksi ini. PPN yang seharusnya dipungut oleh perusahaan pada bulan

Agustus adalah sebesar Rp 190.337.978,00, sehingga DPP pada bulan Agustus seharusnya sebesar Rp 1.903.349.630,00. Dengan demikian, perbedaan peredaran usaha pada bulan Agustus seharusnya hanya disebabkan oleh uang muka sebesar Rp 6.400.000,00, seperti yang diperlihatkan pada tabel 5.3.

Tabel 5.3

**Perhitungan Selisih Peredaran Usaha pada Bulan Agustus
PT Padma Pacific Sukses Tahun 2014 (dalam Rupiah)**

Total Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Bulan Agustus (Formulir 1111)		DPP
Terutang PPN		
Ekspor		-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.903.349.630,00	
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		-
Jumlah	1.903.349.630,00	
Tidak Terutang PPN		-
Jumlah Seluruh Penyerahan	1.903.349.630,00	
Jumlah Peredaran Usaha menurut SPT PPh (Laporan Rugi/Laba) Formulir 1771		
Penjualan Bruto	1.867.734.731,00	
Dikurangi		
Potongan Penjualan	(785.101,00)	
Retur Penjualan		
Laba atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan	30.000.000,00	
Jumlah Peredaran Usaha	1.896.949.630,00	
Selisih Peredaran Usaha	(6.400.000,00)	

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan belum melaporkan peredaran usaha sesuai dengan ketentuan peredaran usaha berdasarkan UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008. Perusahaan melaporkan bonus cuma-cuma yang diberikan kepada pelanggan sebagai komponen penjualannya. Selain itu, diskon penjualan yang diberikan kepada pelanggan karena pembayaran yang dilakukan lebih cepat, dikelompokkan sebagai biaya usaha. Sedangkan, untuk pelaporan SPT Masa PPN selama tahun 2014, perusahaan sudah melaporkan peredaran usaha sesuai dengan UU No.8 tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009, kecuali untuk bulan Agustus. Pada bulan ini, perusahaan menjual aktiva tetap dan memperoleh laba sebesar Rp 30.000.000,00, tetapi perusahaan tidak memungut PPN-nya.
2. Proses ekualisasi peredaran usaha dilakukan dengan cara membandingkan laporan SPT Masa PPN dengan Laporan SPT Tahunan PPh Badan, mengumpulkan data peredaran usaha pada buku besar (yang menjadi dasar pelaporan SPT Tahunan PPh Badan) dan SPT Masa PPN, membandingkan data yang diperoleh, kemudian menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan peredaran usaha.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan peredaran usaha pada PT Padma Pacific Sukses adalah uang muka pelanggan. Selain itu, perusahaan menjual aktiva tetapnya dan memperoleh laba sebesar Rp 30.000.000,00 pada bulan Agustus, tetapi tidak memungut PPN-nya.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

1. Diskon penjualan yang diberikan kepada pelanggan karena pembayaran yang dilakukan lebih cepat, sebaiknya dikelompokkan sebagai pengurang peredaran usaha, sehingga peredaran usaha yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.
2. Bonus cuma-cuma bukan bagian dari penjualan, sehingga perusahaan sebaiknya mengkreditkannya ke akun bonus cuma-cuma yang diberikan, yang pada akhirnya akan memengaruhi harga pokok penjualan, bukan penjualan agar peredaran usaha yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.
3. Setiap transaksi perlu diperhatikan mengenai penyerahan yang dilakukan termasuk BKP ataupun JKP yang harus dipungut PPN-nya. Jika penyerahan tersebut termasuk dalam penyerahan BKP ataupun JKP, perusahaan seharusnya memungut PPN sesuai dengan ketentuan UU

perpajakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan Trisnawati, E. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Burton, R. dan Ilyas, W.B. 2004. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Djuanda, G. dan Lubis, I. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ilyas, W.B. 2012. *Praktikum Perpajakan (Panduan Lengkap, Teori, Pembahasan Kasus dan Penyusunan SPT PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN dan PPh Potong/Pungut)*. Jakarta: In Media.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-29/PJ/1995 tentang Replikasi Sistem Informasi Perpajakan. 1995. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muljono, D. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pardiat. 2010. *Akuntansi Pajak, Edisi 4*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak. 2000. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. 2012. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 2013. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

- Pohan, C.A. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia.
- Pudyatmoko, S. 2009. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Edisi Empat. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Purwiyanto dan Nugraha, K.W.D (Ed). 2014. *Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Penyusunan APBN.
- Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 2 Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi Keempat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Supramono dan Damayanti, T.W. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2008. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2009. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wahono, S. 2012. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

LAMPIRAN 1

BIODATA

I. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anita Holly
2. Tempat dan Tanggal lahir : Ujung Pandang , 4 Juni 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Buddha
5. Alamat email : anita.holly@ymail.com
hollyanita368@gmail.com
6. Alamat Rumah : Jln. Penghibur No.47, Makassar
7. Telepon / HP : 0411-3620822 / 081343525383

II. Riwayat Pendidikan

1. TK Gamaliel - Makassar, Lulus tahun 2000
2. SD Gamaliel - Makassar, Lulus tahun 2006
3. SMP Katolik Rajawali - Makassar, Lulus tahun 2009
4. SMA Katolik Rajawali - Makassar, Lulus tahun 2012

III. Riwayat Prestasi

1. Medali emas OSN ekonomi Tahun 2012

IV. Pengalaman

1. Pembina OSN ekonomi SMA Sulawesi Selatan, Tahun 2015-sekarang
2. Staf pengajar ekonomi SMA Katolik Rajawali-Makassar, Tahun 2015-sekarang.

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, April 2016

Anita Holly

LAMPIRAN 2

PT Padma Pacific Sukses
Perhitungan Peredaran Usaha Tahun 2014 Menurut UU PPh 1984 (dalam Rupiah)

Bulan	Penjualan	Potongan Penjualan	Bonus Cuma-Cuma	Beban Diskon Penjualan	Laba atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan	Peredaran Bruto Menurut UU PPh 1984
	A	B	C	D	E	F=A-B-C-D+E
Januari	1.534.480.783,00	661.554,00	-	1.403.252,03	-	1.532.415.976,97
Februari	1.430.599.916,00	486.323,00	-	1.300.390,52	-	1.428.813.202,48
Maret	898.660.181,00	757.337,00	-	821.806,79	-	897.081.037,21
April	1.068.844.819,00	536.242,00	-	977.437,24	-	1.067.331.139,76
Mei	1.278.316.993,00	509.207,00	-	1.168.995,36	-	1.276.638.790,64
Juni	1.665.604.350,00	722.897,00	1.932.320,00	1.523.161,91	-	1.661.425.971,09
Juli	1.195.139.348,00	893.103,00	3.381.560,00	1.079.213,86	-	1.189.785.471,14
Agustus	1.867.734.731,00	785.101,00	4.347.720,00	1.708.006,11	30.000.000,00	1.890.893.903,89
September	1.548.359.752,00	758.141,00	2.415.400,00	1.410.091,40	-	1.543.776.119,60
Oktober	1.472.771.811,00	566.489,00	-	1.346.820,41	-	1.470.858.501,59
November	1.399.690.270,00	677.232,00	-	1.279.988,80	-	1.397.733.049,20
Desember	1.542.365.134,00	585.031,00	-	1.410.462,11	-	1.540.369.640,89

PT Padma Pacific Sukses
Perhitungan Peredaran Usaha Tahun 2014 Menurut UU PPh 1984 (dalam Rupiah)

Bulan	Peredaran Bruto Menurut UU PPh 1984	Beban Diskon Penjualan	Bonus Cuma- Cuma	Uang Muka	Peredaran Usaha Menurut UU PPN 1984
	A	B	C	D	E=A+B+C+D
Januari	1.532.415.976,97	1.403.252,03	-	8.600.000,00	1.542.419.229,00
Februari	1.428.813.202,48	1.300.390,52	-	(8.600.000,00)	1.421.513.593,00
Maret	897.081.037,21	821.806,79	-	-	897.902.844,00
April	1.067.331.139,76	977.437,24	-	-	1.068.308.577,00
Mei	1.276.638.790,64	1.168.995,36	-	-	1.277.807.786,00
Juni	1.661.425.971,09	1.523.161,91	1.932.320,00	15.000.000,00	1.679.881.453,00
Juli	1.189.785.471,14	1.079.213,86	3.381.560,00	(15.000.000,00)	1.179.246.245,00
Agustus	1.890.893.903,89	1.708.006,11	4.347.720,00	6.400.000,00	1.903.349.630,00
September	1.543.776.119,60	1.410.091,40	2.415.400,00	(6.400.000,00)	1.541.201.611,00
Oktober	1.470.858.501,59	1.346.820,41	-	-	1.472.205.322,00
November	1.397.733.049,20	1.279.988,80	-	-	1.399.013.038,00
Desember	1.540.369.640,89	1.410.462,11	-	36.700.000,00	1.578.480.103,00

LAMPIRAN 3

PT Padma Pacific Sukses
Perhitungan Selisih Peredaran Usaha Tahun 2014 (dalam Rupiah)

Total Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN (Formulir 1111)

Terutang PPN	Januari	DPP Februari	Maret
Ekspor			
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.542.419.229,00	1.421.513.593,00	897.902.844,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
Jumlah	1.542.419.229,00	1.421.513.593,00	897.902.844,00
Tidak Terutang PPN	-	-	-
Jumlah Seluruh Peyerahan	1.542.419.229,00	1.421.513.593,00	897.902.844,00

Jumlah Peredaran Usaha menurut SPT PPh (Laporan Rugi/Laba) Formulir 1771

Penjualan Bruto	1.534.480.783,00	1.430.599.916,00	898.660.181,00
Dikurangi	-	-	-
Potongan Penjualan	(661.554,00)	(486.323,00)	(757.337,00)
Retur Penjualan	-	-	-
Laba atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan	-	-	-
Jumlah Peredaran Usaha	1.533.819.229,00	1.430.113.593,00	897.902.844,00
Selisih Peredaran Usaha	(8.600.000,00)	8.600.000,00	-

PT Padma Pacific Sukses
Perhitungan Selisih Peredaran Usaha Tahun 2014 (dalam Rupiah)

Total Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN (Formulir 1111)

Terutang PPN	April	DPP Mei	Juni
Ekspor	-	-	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.068.308.577,00	1.277.807.786,00	1.679.881.453,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
Jumlah	1.068.308.577,00	1.277.807.786,00	1.679.881.453,00
Tidak Terutang PPN	-	-	-
Jumlah Seluruh Peyerahan	1.068.308.577,00	1.277.807.786,00	1.679.881.453,00

Jumlah Peredaran Usaha menurut SPT PPh (Laporan Rugi/Laba) Formulir 1771

Penjualan Bruto	1.068.844.819,00	1.278.316.993,00	1.665.604.350,00
Dikurangi	-	-	-
Potongan Penjualan	(536.242,00)	(509.207,00)	(722.897,00)
Retur Penjualan	-	-	-
Laba atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan	-	-	-
Jumlah Peredaran Usaha	1.068.308.577,00	1.277.807.786,00	1.664.881.453,00
Selisih Peredaran Usaha	-	-	-

PT Padma Pacific Sukses
Perhitungan Selisih Peredaran Usaha Tahun 2014 (dalam Rupiah)

Total Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN (Formulir 1111)

Terutang PPN		DPP	
	Juli	Agustus	September
Ekspor	-	-	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.179.246.245,00	1.873.349.630,00	1.541.201.611,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
Jumlah	1.179.246.245,00	1.873.349.630,00	1.541.201.611,00
Tidak Terutang PPN	-	-	-
Jumlah Seluruh Penerimaan	1.179.246.245,00	1.873.349.630,00	1.541.201.611,00

Jumlah Peredaran Usaha menurut SPT PPh (Laporan Rugi/Laba) Formulir 1771

Penjualan Bruto	1.195.139.348,00	1.867.734.731,00	1.548.359.752,00
Dikurangi	-	-	-
Potongan Penjualan	(893.103,00)	(785.101,00)	(758.141,00)
Retur Penjualan	-	-	-
Laba atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan	-	30.000.000,00	-
Jumlah Peredaran Usaha	1.194.246.245,00	1.896.949.630,00	1.547.601.611,00
Selisih Peredaran Usaha	15.000.000,00	23.600.000,00	6.400.000,00

Perhitungan Selisih Peredaran Usaha		
Total Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Tahun 2014 (Formulir 1111)		
		DPP
Terutang PPN		
Ekspor	Rp	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	16.931.329.431,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	-
Jumlah	Rp	16.931.329.431,00
Tidak Terutang PPN	Rp	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	16.931.329.431,00
Jumlah Peredaran Usaha menurut SPT PPh (Laporan Rugi/Laba) Formulir 1771		
Penjualan Bruto	Rp	16.902.568.088,00
Dikurangi		
Potongan Penjualan	Rp	(7.938.657,00)
Retur Penjualan		
Laba atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan	Rp	30.000.000,00
Jumlah Peredaran Usaha	Rp	16.924.629.431,00
Selisih Peredaran Usaha	Rp	(6.700.000,00)

LAMPIRAN 4

PT Padma Pacific Sukses
Perhitungan R/L (dalam Rupiah)

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Penjualan	1.534.480.783,00	1.430.599.916,00	898.660.181,00	1.068.844.819,00	1.278.316.993,00	1.665.604.350,00
Potongan Penjualan	(661.554,00)	(486.323,00)	(757.337,00)	(536.242,00)	(509.207,00)	(722.897,00)
Penjualan Neto	1.533.819.229,00	1.430.113.593,00	897.902.844,00	1.068.308.577,00	1.277.807.786,00	1.664.881.453,00
Harga Pokok Penjualan :						
Persediaan Awal	5.845.030.033,00	6.325.447.282,51	6.532.109.806,67	6.938.313.275,72	6.674.275.246,05	6.575.850.934,14
Pembelian	1.584.480.202,00	1.236.377.314,00	1.053.624.045,00	505.698.582,00	821.534.513,00	1.468.059.467,00
Potongan Pembelian	(2.965.135,00)	(3.158.796,00)	(2.568.731,00)	(2.765.327,00)	(2.676.532,00)	(2.958.765,00)
	7.426.545.100,00	7.558.665.800,51	7.583.165.120,67	7.441.246.530,72	7.493.133.227,05	8.040.951.636,14
Persediaan Akhir	(6.325.447.282,51)	(6.532.109.806,67)	(6.938.313.275,72)	(6.674.275.246,05)	(6.575.850.934,14)	(6.845.763.442,90)
Harga Pokok Penjualan	1.101.097.817,49	1.026.555.993,83	644.851.844,96	766.971.284,67	917.282.292,91	1.195.188.193,24
Laba Kotor	432.721.411,51	403.557.599,17	253.050.999,04	301.337.292,33	360.525.493,09	469.693.259,76
Biaya Usaha :						
Biaya Jamsostek	6.199.689,00	6.199.689,00	6.199.689,00	6.199.689,00	6.199.689,00	6.199.689,00
Biaya Expedisi	45.765.287,00	54.245.568,00	48.447.645,00	53.345.793,00	46.306.589,00	43.716.254,00
Biaya Kanvas	2.367.024,00	2.266.963,00	2.307.834,00	2.246.507,00	2.156.507,00	1.994.581,00
Biaya Gaji	220.479.075,00	220.479.075,00	220.479.075,00	220.479.075,00	220.479.075,00	220.479.075,00
Biaya Bonus Cuma-cuma	-	-	-	-	-	2.125.552,00
Biaya BPJS	6.155.500,00	6.155.500,00	6.155.500,00	6.155.500,00	6.155.500,00	6.155.500,00
Biaya Air dan Listrik	4.734.330,00	4.387.684,00	2.771.492,00	3.297.471,00	3.944.118,00	5.138.871,00
Biaya Telepon	3.202.190,00	2.967.462,00	1.875.345,00	2.230.490,00	2.667.621,00	3.475.821,00
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	9.061.403,25	8.678.351,34	8.834.813,05	8.600.042,01	8.255.505,46	7.635.622,94
Biaya Retribusi Tol	2.635.647,00	2.524.230,00	2.569.740,00	2.501.453,00	2.401.239,00	2.220.937,00
Biaya Alat Tulis dan Cetak	1.109.425,00	1.028.100,00	649.720,00	772.770,00	924.220,00	1.204.220,00
Biaya Rupa-rupa	2.570.076,00	2.317.445,00	2.665.442,00	2.741.905,00	2.083.248,00	1.714.450,00
Biaya Rantangan Karyawan	7.250.500,00	7.165.500,00	7.624.500,00	7.352.500,00	7.327.000,00	7.752.000,00
Biaya Diskon Penjualan	1.403.252,03	1.300.390,52	821.806,79	977.437,24	1.168.995,36	1.523.161,91
Izin dan Pungutan	1.023.040,00	752.060,00	1.171.970,00	829.260,00	787.450,00	1.171.910,00
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	358.003,50	358.003,50	358.003,50	358.003,50	358.003,50	358.003,50
Biaya Penyusutan Instalasi Listrik	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
Biaya Penyusutan Kendaraan	13.517.708,33	13.517.708,33	13.517.708,33	13.517.708,33	13.517.708,33	13.517.708,33
Bunga dan Administrasi	14.296.168,60	11.534.867,99	9.506.453,26	5.967.741,97	7.412.396,76	13.245.748,12
Biaya Asuransi	806.923,83	806.923,83	806.923,83	806.923,83	806.923,83	806.923,83
Total Biaya Usaha	342.956.492,55	346.706.771,51	336.784.910,76	338.401.519,88	332.973.039,23	340.457.278,63
Laba Operasional	89.764.918,96	56.850.827,65	(83.733.911,72)	(37.064.227,55)	27.552.453,86	129.235.981,13
Penghasilan (Beban) Lain-lain						
Laba Atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan	-	-	-	-	-	-
Laba Bersih	89.764.918,96	56.850.827,65	(83.733.911,72)	(37.064.227,55)	27.552.453,86	129.235.981,13

PT Padma Pacific Sukses
Perhitungan R/L (dalam Rupiah)

	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penjualan	1.195.139.348,00	1.867.734.731,00	1.548.359.752,00	1.472.771.811,00	1.399.690.270,00	1.542.365.134,00
Potongan Penjualan	(893.103,00)	(785.101,00)	(758.141,00)	(566.489,00)	(677.232,00)	(585.031,00)
Penjualan Neto	1.194.246.245,00	1.866.949.630,00	1.547.601.611,00	1.472.205.322,00	1.399.013.038,00	1.541.780.103,00
Harga Pokok Penjualan :						
Persediaan Awal	6.845.763.442,90	6.750.692.432,67	6.451.471.097,72	6.255.556.979,44	6.171.193.332,76	6.494.066.673,51
Pembelian	765.068.735,00	1.043.644.892,00	917.708.223,00	974.613.523,00	1.330.774.952,00	684.176.490,00
Potongan Pembelian	(2.543.259,00)	(2.635.278,00)	(2.565.388,00)	(2.159.877,00)	(3.525.461,00)	(1.932.385,00)
	7.608.288.918,90	7.791.702.046,67	7.366.613.932,72	7.228.010.625,44	7.498.442.823,76	7.176.310.778,51
Persediaan Akhir	(6.750.692.432,67)	(6.451.471.097,72)	(6.255.556.979,44)	(6.171.193.332,76)	(6.494.066.673,51)	(6.069.555.385,00)
Harga Pokok Penjualan	857.596.486,23	1.340.230.948,96	1.111.056.953,28	1.056.817.292,68	1.004.376.150,25	1.106.755.393,51
Laba Kotor	336.649.758,77	526.718.681,04	436.544.657,72	415.388.029,32	394.636.887,75	435.024.709,49
Biaya Usaha :						
Biaya Jamsostek	6.199.689,00	6.199.689,00	6.199.689,00	6.199.689,00	6.199.689,00	6.199.691,00
Biaya Expedisi	47.304.756,00	49.527.310,00	46.827.335,00	43.569.675,00	45.847.500,92	41.881.256,00
Biaya Kanvas	1.934.920,00	1.996.724,00	2.053.921,00	2.094.610,00	1.782.582,00	1.980.912,00
Biaya Gaji	220.479.075,00	220.479.075,00	220.479.075,00	220.479.075,00	220.479.075,00	440.958.155,00
Biaya Bonus Cuma-cuma	3.719.716,00	4.782.492,00	2.656.940,00	-	-	-
Biaya BPJS	6.155.500,00	6.155.500,00	6.155.500,00	6.155.500,00	6.155.500,00	6.155.500,00
Biaya Air dan Listrik	3.639.895,00	5.762.580,00	4.757.117,00	4.544.151,00	4.318.233,00	4.758.907,00
Biaya Telepon	2.462.742,00	3.897.632,00	3.217.800,00	3.073.414,00	2.920.906,00	3.218.639,00
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	7.407.229,66	7.643.826,74	7.862.787,38	8.018.552,36	6.824.051,78	7.583.295,55
Biaya Retribusi Tol	2.154.505,00	2.223.323,00	2.287.011,00	2.332.318,00	1.984.879,00	2.205.718,00
Biaya Alat Tulis dan Cetak	853.230,00	1.350.360,00	1.114.830,00	1.064.810,00	1.011.970,00	1.115.165,00
Biaya Rupa-rupa	1.923.860,00	2.043.863,00	2.312.945,00	2.400.188,00	2.281.080,00	2.442.868,00
Biaya Rantangan Karyawan	7.361.000,00	7.633.000,00	7.786.000,00	7.913.500,00	8.054.500,00	7.565.000,00
Biaya Diskon Penjualan	1.079.213,85	1.708.006,11	1.410.091,40	1.346.820,41	1.279.988,80	1.410.462,11
Izin dan Pungutan	1.381.120,00	1.214.100,00	1.172.410,00	876.030,00	1.047.290,00	849.950,00
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	358.003,50	358.003,50	358.003,50	358.003,50	358.003,50	358.003,50
Biaya Penyusutan Instalasi Listrik	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
Biaya Penyusutan Kendaraan	13.517.708,33	13.517.708,33	13.517.708,33	13.517.708,33	13.517.708,33	13.517.708,37
Bunga dan Administrasi	6.902.927,29	9.416.415,12	8.280.135,95	8.793.571,06	12.007.081,60	6.173.067,00
Biaya Asuransi	806.923,83	806.923,83	806.923,83	806.923,83	806.923,83	806.923,87
Total Biaya Usaha	335.663.264,46	346.737.781,64	339.277.473,39	333.565.789,48	336.898.212,76	549.202.471,40
Laba Operasional	986.494,31	179.980.899,41	97.267.184,34	81.822.239,84	57.738.674,99	(114.177.761,91)
Penghasilan (Beban) Lain-lain						
Laba Atas Penjualan Aktiva Tetap	-	30.000.000,00	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-	-	-
Laba Bersih	986.494,31	209.980.899,41	97.267.184,34	81.822.239,84	57.738.674,99	(114.177.761,91)

**PT Padma Pacific Sukses
NERACA (dalam Rupiah)**

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Aktiva						
Aktiva Lancar						
Kas	181.210.666,78	142.547.832,47	68.024.609,91	103.769.068,00	135.181.561,57	129.789.572,30
Piutang Dagang	749.492.499,00	466.647.070,97	380.424.640,78	253.010.325,01	159.642.178,10	431.005.460,04
Persediaan	5.787.531.339,00	6.048.577.004,00	6.191.114.992,00	6.400.197.905,00	6.579.638.061,00	6.867.972.558,00
PPh 25	8.759.180,00	17.518.360,00	26.277.540,00	35.036.720,00	43.795.900,00	54.394.900,00
Pinjaman Karyawan	70.436.420,00	75.223.850,00	78.522.300,00	76.935.170,00	84.325.960,00	82.165.980,00
Piutang Lain-lain	47.120.500,00	55.250.133,83	62.783.847,35	67.544.922,43	73.207.630,69	74.317.408,07
Total Aktiva Lancar	6.844.550.604,78	6.805.764.251,27	6.807.147.930,04	6.936.494.110,44	7.075.791.291,36	7.639.645.878,41
Aktiva Tetap						
Inventaris Kantor	107.500.875,00	107.500.875,00	107.500.875,00	107.500.875,00	107.500.875,00	107.500.875,00
Akumulasi Penyusutan	(96.553.877,50)	(96.911.881,00)	(97.269.884,50)	(97.627.888,00)	(97.985.891,50)	(98.343.895,00)
	10.946.997,50	10.588.994,00	10.230.990,50	9.872.987,00	9.514.983,50	9.156.980,00
Kendaraan	1.560.700.000,00	1.560.700.000,00	1.560.700.000,00	1.560.700.000,00	1.560.700.000,00	1.560.700.000,00
Akumulasi Penyusutan	(878.892.708,33)	(892.410.416,66)	(905.928.124,99)	(919.445.833,32)	(932.963.541,65)	(946.481.249,98)
	681.807.291,67	668.289.583,34	654.771.875,01	641.254.166,68	627.736.458,35	614.218.750,02
Instalasi Listrik	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Akumulasi Penyusutan	(4.611.250,00)	(4.632.500,00)	(4.653.750,00)	(4.675.000,00)	(4.696.250,00)	(4.717.500,00)
	488.750,00	467.500,00	446.250,00	425.000,00	403.750,00	382.500,00
Total Aktiva Tetap	693.243.039,17	679.346.077,34	665.449.115,51	651.552.153,68	637.655.191,85	623.758.230,02
Total Aktiva	7.537.793.643,95	7.485.110.328,61	7.472.597.045,55	7.588.046.264,12	7.713.446.483,21	8.263.404.108,43
Pasiva Lancar						
Hutang Dagang	3.426.701.814,03	3.247.420.820,16	3.374.223.642,19	3.504.636.950,85	3.627.477.965,08	4.085.736.626,17
Hutang Dagang IMO (HP)	11.665.000,00	11.665.000,00	11.665.000,00	11.665.000,00	11.665.000,00	11.665.000,00
Bank	943.503.580,19	913.571.884,10	883.640.180,19	853.708.476,19	823.776.772,19	793.845.068,19
Hutang Angsuran PPh 25	8.759.180,00	8.759.180,00	8.759.180,00	8.759.180,00	8.759.180,00	10.599.000,00
PPN	(4.206.102,00)	14.307.526,00	(15.572.122,00)	40.688.878,00	45.627.333,00	21.182.200,00
Uang Muka	8.600.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00
Total Pasiva Lancar	4.395.023.472,22	4.195.724.410,26	4.262.715.880,38	4.419.458.485,04	4.517.306.250,27	4.938.027.894,36
Modal Saham	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Laba Ditahan 31/12	3.112.770.171,73	3.259.385.918,35	3.179.881.165,17	3.138.587.779,08	3.166.140.232,94	3.295.376.214,07
Total Pasiva	7.537.793.643,95	7.485.110.328,61	7.472.597.045,55	7.588.046.264,12	7.713.446.483,21	8.263.404.108,43

PT Padma Pacific Sukses
NERACA (dalam Rupiah)

	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Aktiva						
Aktiva Lancar						
Kas	98.208.554,24	129.328.858,86	77.013.526,63	113.865.604,29	199.528.472,82	108.822.700,02
Piutang Dagang	451.200.010,00	499.100.004,00	501.063.999,45	497.505.539,45	1.106.527.181,00	1.972.464.621,00
Persediaan	6.892.803.491,00	6.393.494.162,00	6.290.668.114,00	6.177.021.562,00	6.493.620.245,00	6.069.555.385,00
PPh 25	64.993.900,00	75.592.900,00	86.191.900,00	96.790.900,00	107.389.900,00	117.988.900,00
Pinjaman Karyawan	79.653.920,00	83.635.980,00	85.912.650,00	82.629.500,00	80.956.910,00	78.971.220,00
Piutang Lain-lain	82.031.953,30	80.569.751,46	91.927.156,70	88.739.008,64	82.120.109,59	89.390.367,00
Total Aktiva Lancar	7.668.891.828,54	7.261.721.656,32	7.132.777.346,78	7.056.552.114,38	8.070.142.818,41	8.437.193.193,02
Aktiva Tetap						
Inventaris Kantor	107.500.875,00	107.500.875,00	107.500.875,00	107.500.875,00	107.500.875,00	107.500.875,00
Akumulasi Penyusutan	(98.701.898,50)	(99.059.902,00)	(99.417.905,50)	(99.775.909,00)	(100.133.912,50)	(100.491.916,00)
	8.798.976,50	8.440.973,00	8.082.969,50	7.724.966,00	7.366.962,50	7.008.959,00
Kendaraan	1.560.700.000,00	1.465.700.000,00	1.465.700.000,00	1.465.700.000,00	1.465.700.000,00	1.465.700.000,00
Akumulasi Penyusutan	(959.998.958,31)	(878.516.666,64)	(892.034.374,97)	(905.552.083,30)	(919.069.791,63)	(932.587.500,00)
	600.701.041,69	587.183.333,36	573.665.625,03	560.147.916,70	546.630.208,37	533.112.500,00
Instalasi Listrik	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Akumulasi Penyusutan	(4.738.750,00)	(4.760.000,00)	(4.781.250,00)	(4.802.500,00)	(4.823.750,00)	(4.845.000,00)
	361.250,00	340.000,00	318.750,00	297.500,00	276.250,00	255.000,00
Total Aktiva Tetap	609.861.268,19	595.964.306,36	582.067.344,53	568.170.382,70	554.273.420,87	540.376.459,00
Total Aktiva	8.278.753.096,73	7.857.685.962,68	7.714.844.691,31	7.624.722.497,08	8.624.416.239,28	8.977.569.652,02
Pasiva Lancar						
Hutang Dagang	4.124.795.264,16	3.475.726.205,71	3.292.570.589,00	3.163.148.028,93	4.177.970.166,13	4.555.926.500,00
Hutang Dagang IMO (HP)	11.665.000,00	11.665.000,00	11.665.000,00	11.665.000,00	11.665.000,00	11.665.000,00
Bank	763.913.364,19	733.981.660,18	704.049.956,18	674.118.252,18	644.186.548,19	614.254.835,97
Hutang Angsuran PPh 25	10.599.000,00	10.599.000,00	10.599.000,00	10.599.000,00	10.599.000,00	10.599.000,00
PPN	41.417.760,00	82.970.489,00	62.349.354,00	49.759.184,00	6.823.818,00	89.430.371,00
Uang Muka	-	6.400.000,00	-	-	-	36.700.000,00
Total Pasiva Lancar	4.952.390.388,35	4.321.342.354,89	4.081.233.899,18	3.909.289.465,11	4.851.244.532,32	5.318.575.706,97
Modal Saham	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Laba Ditahan 31/12	3.296.362.708,38	3.506.343.607,79	3.603.610.792,13	3.685.433.031,97	3.743.171.706,96	3.628.993.945,05
Total Pasiva	8.278.753.096,73	7.857.685.962,68	7.714.844.691,31	7.624.722.497,08	8.624.416.239,28	8.977.569.652,02

PT Padma Pacific Sukses
Laporan Perhitungan R/L
Periode 02/01/2014 s/d 31/12/2014

Penjualan	Rp	16.902.568.088,00	
Potongan Penjualan	Rp	(7.938.657,00)	
Penjualan Neto	Rp	16.894.629.431,00	
Harga Pokok Penjualan :			
Persediaan Awal	Rp	5.845.030.033,00	
Pembelian	Rp	12.385.760.938,00	
Potongan Pembelian	Rp	(32.454.934,00)	
	Rp	18.198.336.037,00	
Persediaan Akhir	Rp	(6.069.555.385,00)	
Harga Pokok Penjualan	Rp	12.128.780.652,00	
Laba Kotor	Rp	4.765.848.779,00	
Biaya Usaha :			
Biaya Jamsostek	Rp	74.396.270,00	
Biaya Expedisi	Rp	566.784.968,92	
Biaya Kanvas	Rp	25.183.085,00	
Biaya Gaji	Rp	2.866.227.980,00	
Biaya Bonus Cuma-cuma	Rp	13.284.700,00	
Biaya BPJS	Rp	73.866.000,00	
Biaya Air dan Listrik	Rp	52.054.849,00	
Biaya Telepon	Rp	35.210.062,00	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp	96.405.481,52	
Biaya Retribusi Tol	Rp	28.041.000,00	
Biaya Alat Tulis dan Cetak	Rp	12.198.820,00	
Biaya Rupa-rupa	Rp	27.497.370,00	
Biaya Rantangan Karyawan	Rp	90.785.000,00	
Biaya Diskon Penjualan	Rp	15.429.626,53	
Izin dan Pungutan	Rp	12.276.590,00	
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	Rp	4.296.042,00	
Biaya Penyusutan Instalasi Listrik	Rp	255.000,00	
Biaya Penyusutan Instalasi Listrik	Rp	255.000,00	
Biaya Penyusutan Kendaraan	Rp	162.212.500,00	
Bunga dan Administrasi	Rp	113.536.574,73	
Biaya Asuransi	Rp	9.683.086,00	
Total Biaya Usaha	Rp	(4.279.625.005,70)	
Laba Operasional	Rp	486.223.773,30	
Penghasilan (Beban) Lain-lain			
Laba Atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan	Rp	30.000.000,00	
Laba Bersih	Rp	516.223.773,30	

PT PADMA PACIFIC SUKSES
PEREDARAN USAHA TAHUN 2014 (FORMULIR 1111)

Bulan	DPP	PPN
Januari	Rp 1.542.419.229,00	Rp 142.151.359,00
Februari	Rp 1.421.513.593,00	Rp 154.241.918,00
Maret	Rp 897.902.844,00	Rp 89.790.282,00
April	Rp 1.068.308.577,00	Rp 106.830.858,00
Mei	Rp 1.277.807.786,00	Rp 127.780.784,00
Juni	Rp 1.679.881.453,00	Rp 167.988.146,00
Juli	Rp 1.179.246.245,00	Rp 117.924.633,00
Agustus	Rp 1.873.349.630,00	Rp 187.334.978,00
September	Rp 1.541.201.611,00	Rp 154.120.170,00
Oktober	Rp 1.472.205.322,00	Rp 147.220.536,00
November	Rp 1.399.013.038,00	Rp 139.901.313,00
Desember	Rp 1.578.480.103,00	Rp 157.848.020,00
TOTAL	Rp 16.931.329.431,00	Rp 1.693.132.997,00